

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, Bandung, 2023.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Publika Global Media, Yogyakarta, 2021.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Ctk. Kedua, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) Teori dan Praktik: Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 2013.
- Lucky Dafira Nugroho, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*, Ctk. Kelima, Prenada/Kencana, Jakarta, 2015.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Edisi keenam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga Belas, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kelima, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ctk. Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009.
- Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin, *Hukum Kepailitan Dalam Islam*, Ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2022.
- Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Ctk. Pertama, Pena Indis, Makassar, 2016.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Ctk. Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, UBL Press, Bandar Lampung, 2019.
- Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019.

JURNAL

- A.A. Sagung Wira Chantieka & Ibrahim, “Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit”, *Jurnal Kertha Wicara*, Edisi No. 17 Vol. 1, 2018.
- Abdul Rinaldi Safi'i Harahap, Fauziah Lubis “Eksistensi Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Edisi No. 3 Vol. 06, 2024.
- Afif Khalid dkk, “Aspek-Aspek Hukum Tentang Permohonan Pernyataan Pailit”, *Al'Adl Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 14, 2022.
- Ahmad Faisal, “Penegakan Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo”, *International Journal of Cross Knowledge*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2023.
- Almas Qinthar Tri Cipto, “Tanggung Jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Keadaan Pailit”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2023.
- Andika Trisno dkk, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado”, *Jurnal Eksekutif*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2017.
- Arfan Syarif Sutrisno dan Ferdi, “Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan”, *Ekasakti Legal Science Journal*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2025.
- B.G.M. Widiapradnyana Arjaya, “Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara Anggota ASEAN Non-Indonesia Pasca Berlakunya AEC”, *Jurnal RechtsVinding*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2014.
- Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 3 Vol. 28, 2021.
- Eka Putri Amalia, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso, “Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Mimbar Yustitia*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2023.
- Enju Juanda, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Galuh Justisi*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2016.
- Erpan Ardiansyah, Elisatris Gultom, Sudaryat, “Analisis Yuridis dan Praktik Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan & PKPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, Edisi No. 4 Vol. 2, 2025.
- Fauziah Lubis, dkk, “Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Edisi No. 3 Vol. 5, 2025.

- Guruh Marda, dkk, “Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim”, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, Edisi No. 03 Vol. 08, 2023.
- Hendri Siahaan dkk, “Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kajian Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.”, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Edisi No. 8 Vol. 3, 2024.
- I Komang Mudita, I Nyoman Sujana, dan Desak Gde Dwi Ani, “Kedudukan Bank Indonesia (BI) Sebagai Pemohon Pailit Setelah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2020.
- Imanuel Rahmani, “Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (*Developer*) Rumah Susun”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018.
- Indah Wijayati “Penerapan Penafsiran Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Nomor : 48/pailit/2012/pn.niaga.jkt.pst dan Putusan Nomor : 704 K/pdt.sus/2012””, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- Irhani dan Nova Yarsina, “Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst Antara PT. Prima Jaya Informatika Dengan PT. Telekomunikasi Selular”, *Ensiklopedia of Journal*, Edisi No. 4 Vol. 5, 2023.
- Iwan Sidharta, “Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby)”, *Jurnal Legal Reasoning Pancasila*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018.
- Iwan Sidharta, “Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016)”, *Jurnal Legal Reasoning*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018.
- Juliati Br Ginting, “Proses Pembuktian Perkara Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2020.
- Kernelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2020.
- Lilik Warsito, “Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan”, *Jurnal USM Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2024.
- Liza Dzulhijjah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Asep Hakim Zakiran, “Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dalam

- Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021.
- M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Al-Himayah*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2020.
- Martunas Sianturi, Dewi Iryani, dan Puguh Aji Hari Setiawan, “Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan”, *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Edisi No. 6 Vol. 14, 2023.
- Mulyani Zulaeha, “Model *Solvable Test* Pada Pembuktian Kepailitan Di Pengadilan Niaga Sebagai Bentuk Keadilan Bagi Debitor Perusahaan”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2018.
- Nelson Kapoyos, “Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan (Kajian Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)”, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 10, 2017.
- Niru Anita Sinaga, “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2016.
- Robert Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar, “Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Kasus Putusan No: 04/PDT.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *USU Law Journal*, Edisi No. 4 Vol. 4, 2016.
- Rulman Ignatius Rongkonusa dkk, “Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Persidangan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU)”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2023.
- Siti Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No Khusus Vol. 16, 2009.
- Yoas Penggawa Silitonga, dkk, “Pengaturan Batasan Utang Dalam Permohonan Pailit Analisis Undang-Undang PKPU dan Kedudukan Putusan Hakim”, *Pakuan Law Review*, Edisi No. 4 Vol. 10, 2024
- Yofi Permatasari, dkk, “Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No. 10 Vol. 5, 2024.
- Yunita Kadir, “Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2014.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Fadika Muhzal, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Medan, 2024.

Kiflan Radhina, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah Secara Non Litigasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional”, *Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Jakarta, 2022.

Natashya Friska Salsabila, “Implementasi Pembuktian Terhadap Fakta Atau Keadaan Sederhana Dalam Permohonan Pernyataan Pailit”, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2021.

Victorianus M.H. Randa Puang, “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit”, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2006.

Wayan Karya, “Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia”, *Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya*, Jakarta, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 696 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg.

DATA ELEKTRONIK

Alfin Sulaiman, “Hubungan OJK terhadap Prosedur Kepailitan Perbankan dan Industri Keuangan”, 2014, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-ojk-terhadap-prosedur-kepailitan-perbankan-dan-industri-keuangan-lt52dfe654d9902/>. Akses tanggal 25 Juli 2025.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Isu Krusial Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, terdapat dalam <https://bphn.go.id/data/documents/ISU%20KRUSIAL%20NASKAH%20AKADEMIK%20PERUBAHAN%20UU%20NO%2037%20TAHUN%202004%20TENTANG%20KEPAILITAN%20DAN%20PKPU.pdf>. Akses 30 Juni 2025.

Fitri Novia Heriani, “Memahami Konsep Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Pailit/PKPU”, 13 Maret 2024, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-konsep-pembuktian-sederhana-dalam-sengketa-pailit-pkpu-lt65f1653d00575/>. Akses 17 Juni 2025.

Hukumku, *Memahami Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*, 2025, dalam <https://hukumku.id/post/pembuktian-sederhana-dalam-kepailitan>. Akses 30 Juni 2025.

Putu Bravo Timothy, *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*, 15 Oktober 2024, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan-lt57cac8511d5b4/>. Akses 19 September 2025.

Ricardo Simanjuntak, *Reformasi Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan Tidak Didasarkan Pada Insolvency Test*, 8 Agustus 2003, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-hukum-kepailitan-indonesia--kepailitan-tidak-didasarkan-pada-insolvency-test-lt64d2137ca3c49/>, diakses tanggal 19 September 2025.

Wiko, “Profil Hakim Pengadilan Niaga”, 2004, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/profil-hakim-pengadilan-niaga-ho11818/>. Akses 26 Juni 2025.

Wildan Azky, *Mendekonstruksi Sistem Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, 2019, dalam <https://news.unair.ac.id/2019/10/22/mendekonstruksi-sistem-pembuktian-sederhana-dalam-kepailitan/>. Akses 30 Juni 2025.

SUMBER LAIN

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.